



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kejelasan pelayanan pencairan dana bahan bakar minyak operasional mobil dinas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pencairan Dana Bahan Bakar Minyak Operasional Mobil Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bendahara adalah Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PPTK pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pengguna adalah pengguna Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.

9. Bahan Bakar Minyak operasional mobil dinas yang selanjutnya disingkat BBM operasional mobil dinas adalah BBM operasional mobil dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Pelumas adalah Pelumas operasional mobil dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- (2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III SOP PELAYANAN PERMINTAAN BBM DAN PELUMAS

Pasal 4

Pengguna mengajukan permohonan permintaan BBM dan Pelumas kepada PPTK.

Pasal 5

PPTK menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas dari Pengguna :

- a. Apabila setuju, maka permohonan diteruskan ke Kepala Bagian;
- b. Apabila tidak setuju, maka permohonan dikembalikan kepada Pengguna.

Pasal 6

Kepala Bagian menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas dari PPTK, memberikan disposisi dan dikembalikan ke PPTK untuk diproses.

Pasal 7

PPTK menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas yang telah diberikan disposisi Kepala Bagian dan meneruskan ke Bendahara.

Pasal 8

Bendahara menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas yang telah diberikan disposisi Kepala Bagian dan memproses permohonan untuk :

- a. memberikan uang atas pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna.
- b. Memberikan uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna.

Pasal 9

Pengguna BBM dan Pelumas :

- a. Menerima uang atas pembelian BBM dan Pelumas dengan menyerahkan tanda bukti pembelian BBM dan Pelumas.
- b. Menerima uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas dengan mengembalikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada bendahara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



[Signature]
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



[Signature]
HUBRIANSYAH


Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,






[Signature]
ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <p>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)</p>	<table border="1"> <tr><td>Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr><td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr><td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif	
Nomor SOP									
Tanggal Pembuatan									
Tanggal Revisi									
Tanggal Efektif									
<p>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p>	<table border="1"> <tr><td>Disahkan Oleh</td><td>Bupati Hulu Sungai Selatan</td></tr> <tr><td>Nama SOP</td><td>Pelayanan Permintaan BBM dan Pelumas Pada Bagian Umum</td></tr> </table>	Disahkan Oleh	Bupati Hulu Sungai Selatan	Nama SOP	Pelayanan Permintaan BBM dan Pelumas Pada Bagian Umum				
Disahkan Oleh	Bupati Hulu Sungai Selatan								
Nama SOP	Pelayanan Permintaan BBM dan Pelumas Pada Bagian Umum								
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik setiap tahapan kegiatan. 2. Memiliki disiplin dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan. 								
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor. 								
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarsipan berkas proses pencairan dana. 2. Pembukuan pencairan dana. 								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	PPTK	Kepala Bagian	Bendahara	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan Permohonan Permintaan BBM dan Pelumas					Permohonan	5 Menit	Permohonan	
2	Menerima Permohonan : a. bila setuju, diteruskan ke Kepala Bagian b. bila tidak setuju, dikembalikan ke Pengguna					Permohonan	5 Menit	Permohonan	
3	Menerima permohonan dan memberikan disposisi		dikembalikan			Permohonan	5 Menit	Permohonan, disposisi	
4	Menerima permohonan yang telah diberikan disposisi		diteruskan			Permohonan, disposisi	5 Menit	Permohonan, disposisi	
5	Menerima permohonan yang telah diberikan disposisi dan memproses permohonan : a. memberikan uang atas pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna b. Memberikan uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna					Permohonan, disposisi	15 Menit	Permohonan, disposisi	
6	a. Menerima uang atas pembelian BBM dan Pelumas dengan menyerahkan tanda bukti pembelian BBM dan Pelumas. b. Menerima uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas dengan mengembalikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada bendahara.					Permohonan, disposisi	5 Menit	Tanda Bukti Pembelian BBM dan Pelumas atau Tanda Terima Uang Muka Pembelian BBM dan Pelumas	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


ACHMAD FIKRY